



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jl. Jenderal A. Yani Kav-58 Bypass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat

Fax. 021-29079200 / PO. BOX 1148 JKT 13011 JAT

Jakarta, 03 Februari 2020

Nomor : 141/DJU/KU.01/2/2020
Sifat : Segera
Lampiran : Dua Set
Hal : Permintaan Dokumen

Yth. 1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

Di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan adanya Surat Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor : 03/LK-MA/01/2020 hal Permintaan Dokumen terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendaftaran biaya perkara, hak redaksi, sisa panjar biaya perkara dan PNBP Lainnya (terlampir) dan Nomor 05/LK-MA/01/2020 hal Permintaan Dokumen Terkait Uang Konsinyasi, Uang Titipan Perkara Pidana dan PHI tanggal 27 Januari (terlampir). Surat Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung R.I Nomor : 025/Bua.3/KU.00/1/2020 hal Permintaan Dokumen tanggal 31 Januari 2020.

Bersama ini diperintahkan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama agar segera mengirimkan permintaan dokumen tersebut dengan melibatkan bagian kesekretariatan dan bagian kepaniteraan, dikirimkan melalui surel ke bpk.lkma2019@gmail.com dan Mahkamah Agung cq. Bagian PNBP Biro Keuangan email : keuangan.pnbp@yahoo.co.id dengan tembusan kepada Ditjen Badan Peradilan Umum email : keuanganbadilum@gmail.com dalam bentuk PDF dan Excel.

Contact Person :

BPK	1. Theones Ronald	: 081224342771
	2. Elly Setyo Rini	: 081365008178
	3. Rio Andalas Soekotjo	: 085244585745
Biro Keuangan :	1. Lilies Ainany	: 081911119009
	2. M. Ali Zaki	: 081809071899
	3. Jatmiko Hendro Yuwono	: 085711953247
Ditjen Badilum:	1. Puji Mulyani	: 081330663344
	2. Nissa Tunjung Hapsari	: 081327045353

Mengingat pentingnya dokumen tersebut, dikirimkan paling lambat hari Senin tanggal 10 Februari 2020.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

Dr. H. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001



MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13 JAKARTA 10110 TROMOL POS NO. 1020
TELEPON (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAKSIMILE (021) 3810361

Nomor : /Bua.3/KU.00/1/2020
Sifat : Segera
Lampiran : Dua set
Hal : Permintaan Dokumen

Januari 2020

Yth.,

1. Panitera Mahkamah Agung
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
di Jakarta

Berkaitan dengan Surat Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 03/LK-MA/01/2020 hal Permintaan Dokumen dan Nomor: 05/LK-MA/01/2020 hal Permintaan Dokumen Terkait Uang Konsinyasi, Uang Titipan Perkara Pidana dan PHI tanggal 27 Januari 2020 (terlampir), dengan ini mohon perkenan meneruskan surat dimaksud ke Pengadilan Tingkat Pertama yang berada pada kewenangan Bapak/Ibu serta memonitoring penyerahan data yang diminta.

Atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Kepala Biro Keuangan

Sahyan, S.H.,M.H

Nip. 19680817 1989023 1 007

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung
3. Sekretaris Mahkamah Agung
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung
5. Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210, Telepon 021-25549000 Ekstensi 3562 Faksimile 021-5700501

Jakarta, 27 Januari 2020

Nomor : 03/LK-MA/01/2020
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permintaan Dokumen

**Yth.
Sekretaris Mahkamah Agung
di Jakarta**

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2019 pada Mahkamah Agung sesuai Surat Tugas No. 29/ST/V-XVI.1/01/2020 tanggal 21 Januari 2020, kami membutuhkan dokumen terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendaftaran biaya perkara, hak redaksi, sisa panjar biaya perkara, dan PNBP lainnya pada pengadilan tingkat pertama (PN, PA, PTUN, dan PT TUN Jakarta) dan pengadilan tingkat banding (PT, PTA, dan PT TUN) yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Dokumen yang kami butuhkan berupa *softcopy* dalam bentuk *ms-excel* sesuai format pada lampiran dan dokumen pendukung berupa *softcopy* dalam bentuk PDF, antara lain:

1. Laporan keadaan perkara Tahun 2018 dan 2019 (sesuai contoh tabel pada **Lampiran 1**). Rincian dikirimkan dalam bentuk pdf yang sudah ditandatangani dan dalam bentuk *ms-excel*.
2. Total perkara yang didaftarkan di pengadilan tingkat pertama (gugatan, permohonan, eksekusi, banding, kasasi, peninjauan kembali) Tahun 2018, namun biaya pendaftarannya disetorkan ke kas negara pada Tahun 2019 (sesuai contoh tabel pada **Lampiran 2**). Rincian dikirimkan dalam bentuk pdf yang sudah ditandatangani dan dalam bentuk *ms-excel*.
3. Total perkara yang didaftarkan di pengadilan tingkat pertama (gugatan, permohonan, eksekusi, banding, kasasi, peninjauan kembali) Tahun 2019, namun biaya pendaftarannya belum disetor/disetorkan ke kas negara pada Tahun 2020 (sesuai contoh tabel pada **Lampiran 3**). Rincian dikirimkan dalam bentuk pdf yang sudah ditandatangani dan dalam bentuk *ms-excel*.
4. Total perkara yang putus di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding Tahun 2018, namun hak redaksinya disetorkan ke kas negara Tahun 2019 (sesuai contoh tabel pada **Lampiran 4**). Rincian dikirimkan dalam bentuk pdf yang sudah ditandatangani dan dalam bentuk *ms-excel*.
5. Total perkara yang putus di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding Tahun 2019, namun hak redaksinya disetorkan ke kas negara Tahun 2020 (sesuai contoh tabel pada **Lampiran 5**). Rincian dikirimkan dalam bentuk pdf yang sudah ditandatangani dan dalam bentuk *ms-excel*.
6. Rekapitulasi perkara di pengadilan tingkat pertama yang sisa panjar biaya perkaranya belum dikembalikan kepada pihak yang berperkara/belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2019 (sesuai contoh tabel pada **Lampiran 6**). Rincian dikirimkan dalam bentuk pdf yang sudah ditandatangani dan dalam bentuk *ms-excel*.
7. Total perkara eksekusi sampai dengan 31 Desember 2019 yang belum diperhitungkan sisa panjar biaya perkaranya dan belum dikembalikan ke pihak berperkara/ke kas negara (sesuai contoh tabel pada **Lampiran 7**). Rincian dikirimkan dalam bentuk pdf yang sudah ditandatangani dan dalam bentuk *ms-excel*.
8. PNBP lainnya di pengadilan tingkat pertama Tahun 2018, namun disetorkan ke kas negara pada Tahun 2019 (sesuai contoh tabel pada **Lampiran 8**). Rincian dikirimkan dalam bentuk pdf yang sudah ditandatangani dan dalam bentuk *ms-excel*.
9. PNBP lainnya di pengadilan tingkat pertama Tahun 2019, namun disetorkan ke kas negara pada Tahun 2020 (sesuai contoh tabel pada **Lampiran 9**). Rincian dikirimkan dalam bentuk pdf yang sudah ditandatangani dan dalam bentuk *ms-excel*.

Dokumen tersebut dapat dikirimkan melalui surel ke bpk.lkma2019@gmail.com (CP : Theones Ronald - 081224342771 dan Elly Setyo Rini - 081365008178) dengan tembusan ke Mahkamah Agung cq.

Biro Keuangan. Mengingat pentingnya dokumen tersebut dan keterbatasan waktu pemeriksaan, kami harapkan dokumen tersebut dapat kami terima paling lambat hari Jumat tanggal 31 Januari 2020.

Demikianlah pemberitahuan kami. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Ketua Tim,



Rio Andalas Soekotjo
NIP 198101202006041002

Tembusan Yth.:

1. Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
2. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
3. Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung
4. Badan Pengawasan Mahkamah Agung
5. Penanggung Jawab
6. Pengendali Teknis

LAPORAN KEADAAN PERKARA TAHUN 2018 DAN 2019

Pengadilan Tingkat Pertama

No	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(3+4-5)</i>
A	2018				
1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHI dan Niaga)				
2	Perdata Permohonan Tingkat Pertama				
3	Eksekusi				
4	Perdata Tingkat Banding				
5	Perdata Tingkat Kasasi				
6	Perdata Tingkat Peninjauan Kembali				
B	2019				
1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHI dan Niaga)				
2	Perdata Permohonan Tingkat Pertama				
3	Eksekusi				
4	Perdata Tingkat Banding				
5	Perdata Tingkat Kasasi				
6	Perdata Tingkat Peninjauan Kembali				

Pengadilan Tingkat Banding

No	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(3+4-5)</i>
A	2018				
1	Perdata Tingkat Banding				
B	2019				
1	Perdata Tingkat Banding				

Jakarta, Januari 2020
Ketua PN/PA/PTUN/PT/PTA/PT TUN

.....
NIP.

Lampiran 2

DAFTAR PERKARA TAHUN 2018 YANG BIAYA PENDAFTARANNYA DISETORKAN KE KAS NEGARA TAHUN 2019

No.	Urutan	Jumlah Perkara yang Didaftarkan Tahun 2018	Tarif PNDP Biaya Pendaftaran (Rp)	Jumlah PNDP Biaya Pendaftaran (Rp)	Jumlah PNDP yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2018 (Rp)	Sisa PNDP yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2018 (Rp)	Sisa PNDP yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2019 (Rp)
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7=(5-6)	8
1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHH dan Niaga)						
2	Perdata Permohonan Tingkat Pertama						
3	Eksekusi						
4	Perdata Tingkat Banding						
5	Perdata Tingkat Kasasi						
6	Perdata Tingkat Peninjauan Kembali						
	Jumlah						

Jakarta, Januari 2020
Ketua PN/PA/PTUN/PT/PTA/PT TUN

.....
NIP.

DAFTAR PERKARA TAHUN 2019 YANG BIAYA PENDAFTARANNYA DISETORKAN KE KAS NEGARA TAHUN 2020

No.	Uraian	Jumlah Perkara yang Didaftarkan Tahun 2019	Tarif PNBP Biaya Pendaftaran (Rp)	Jumlah PNBP Biaya Pendaftaran (Rp)	Jumlah PNBP yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2019 (Rp)	Sisa PNBP yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2019 (Rp)	Sisa PNBP yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7=(5-6)	8
1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHI dan Niaga)						
2	Perdata Permohonan Tingkat Pertama						
3	Eksekusi						
4	Perdata Tingkat Banding						
5	Perdata Tingkat Kasasi						
6	Perdata Tingkat Peninjauan Kembali						
	Jumlah						

Jakarta, Januari 2020
Ketua PN/PA/PTUN/PT/PTA/PT TUN

.....
NIP.

Lampiran 4

DAFTAR PERKARA PUTUS TAHUN 2018 YANG HAK REDAKSINYA DISETORKAN KE KAS NEGARA TAHUN 2019

No.	Uraian	Jumlah Perkara yang Putus Tahun 2018	Tarif PNBP Hak Redaksi (Rp)	Jumlah PNBP Hak Redaksi (Rp)	Jumlah PNBP yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2018 (Rp)	Sisa PNBP yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2018 (Rp)	Sisa PNBP yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2019 (Rp)
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7=(5-6)	8
1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHI dan Niaga)						
2	Perdata Permohonan Tingkat Pertama						
	Jumlah						

No.	Uraian	Jumlah Perkara yang Didaftarkan Tahun 2018	Tarif PNBP Hak Redaksi (Rp)	Jumlah PNBP Biaya Pendaftaran (Rp)	Jumlah PNBP yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2018 (Rp)	Sisa PNBP yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2018 (Rp)	Sisa PNBP yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2019 (Rp)
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7=(5-6)	8
1	Perdata Tingkat Banding						
	Jumlah						

Jakarta, Januari 2020
Ketua PN/PA/PTUN/PT/PTA/PT TUN

.....
NIP.

DAFTAR PERKARA PUTUS TAHUN 2019 YANG HAK REDAKSINYA DISETORKAN KE KAS NEGARA TAHUN 2020

No.	Urutan	Jumlah Perkara yang Putus Tahun 2019	Tarif PNBPN Hak Redaksi (Rp)	Jumlah PNBPN Hak Redaksi (Rp)	Jumlah PNBPN yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2019 (Rp)	Sisa PNBPN yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2019 (Rp)	Sisa PNBPN yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7=(5-6)	8
1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHI dan Niaga)						
2	Perdata Permohonan Tingkat Pertama						
	Jumlah						

No.	Urutan	Jumlah Perkara yang Didaftarkan Tahun 2019	Tarif PNBPN Hak Redaksi (Rp)	Jumlah PNBPN Biaya Pendaftaran (Rp)	Jumlah PNBPN yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2019 (Rp)	Sisa PNBPN yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2019 (Rp)	Sisa PNBPN yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7=(5-6)	8
1	Perdata Tingkat Banding						
	Jumlah						

Jakarta, Januari 2020
Ketua PN/PA/PTUN/PT/PTA/PT TUN

.....
NIP.

Lampiran 8

PNBP LAINNYA YANG DITERIMA DI TAHUN 2018 NAMUN DISETORKAN KE KAS NEGARA TAHUN 2019

No.	Jenis PNBP	Tarif PNBP (Rp)	Jumlah PNBP (Rp)	Jumlah PNBP Lainnya yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2018 (Rp)	Sisa PNBP Lainnya yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2018 (Rp)	Sisa PNBP Lainnya yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7
1						
2						
3						
4						
	Jumlah					

Jakarta, Januari 2020
Ketua PN/PA/PTUN

.....
NIP.

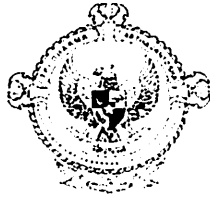
Lampiran 9

PNBP LAINNYA YANG DITERIMA DI TAHUN 2019 NAMUN DISETORKAN KE KAS NEGARA TAHUN 2020

No.	Jenis PNBP	Tarif PNBP (Rp)	Jumlah PNBP (Rp)	Jumlah PNBP Lainnya yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2019 (Rp)	Sisa PNBP Lainnya yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2019 (Rp)	Sisa PNBP Lainnya yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2020 (Rp)
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7
1						
2						
3						
4						
	Jumlah					

Jakarta, Januari 2020
Ketua PN/PA/PTUN

.....
NIP.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210, Telepon 021-25549000 Ekstensi 3562 Faksimile 021-5700501

Jakarta, 27 Januari 2020

Nomor : 05/LK-MA/01/2020
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permintaan Dokumen Terkait Uang Konsinyasi, Uang
Titipan Perkara Pidana, dan PHI

Yth.
Sekretaris Mahkamah Agung
di Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2019 pada Mahkamah Agung sesuai Surat Tugas No. 29/ST/V-XVI.1/01/2020 tanggal 21 Januari 2020, kami membutuhkan dokumen terkait uang konsinyasi, uang titipan perkara pidana, dan PHI yang berada di pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung untuk meyakini saldo Uang Titipan Pihak Ketiga/Keuangan Perkara yang akan diungkapkan dalam Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2019.

Dokumen yang kami butuhkan berupa *softcopy* dalam bentuk *ms-excel* sesuai format pada lampiran dan dokumen pendukung berupa *softcopy* dalam bentuk PDF, antara lain:

1. Rincian uang konsinyasi, uang titipan perkara pidana, dan PHI untuk masing-masing perkara/pihak sesuai saldo per 31 Desember 2019 termasuk penerimaan dan/atau pengeluaran (sesuai contoh tabel pada **Lampiran 1**). Rincian dikirimkan dalam bentuk pdf yang sudah ditandatangani dan dalam bentuk *ms-excel*.
2. Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen pendukung penyerahan/penerimaan uang konsinyasi, uang titipan perkara pidana, dan PHI dari para pihak kepada pengadilan. File dikirimkan dalam bentuk PDF.
3. BAST atau dokumen pendukung penyerahan/pengeluaran uang konsinyasi dari pengadilan kepada para pihak. File dikirimkan dalam bentuk PDF.
4. Data penempatan uang perkara dan/atau uang pihak ketiga (uang konsinyasi, uang titipan perkara pidana, dan PHI) ke rekening bank persepsi Tahun 2018 dan 2019 (sesuai contoh tabel pada **Lampiran 2**). Rincian dikirimkan dalam bentuk pdf yang sudah ditandatangani dan dalam bentuk *ms-excel*.

Dokumen tersebut kami harapkan dapat dikirimkan melalui surel ke bpk.lkma2019@gmail.com (CP : Elly Setyo Rini - 081365008178 dan Rio Andalas Soekotjo - 085244585745). Mengingat pentingnya dokumen tersebut dan keterbatasan waktu pemeriksaan, kami harapkan dokumen dapat kami terima paling lambat hari Senin tanggal 31 Januari 2020.

Demikianlah pemberitahuan kami. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Ketua Tim,

Rio Andalas Soekotjo
NIP 198101202006041002

Tembusan Yth.:

1. Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
2. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
3. Badan Pengawasan Mahkamah Agung
4. Penanggung Jawab
5. Pengendali Teknis

REKAPITULASI UANG KONSINYASI, UANG TITIPAN PERKARA PIDANA, DAN PHI

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Nama Para Pihak	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir per 31 Des 2019 (Rp)	Progress Penyelesaian Perkara*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) - (6)	(8)
A	Uang Konsinyasi						
1							
2							
3							
dst							
	Jumlah						
B	Uang Titipan Perkara Pidana						
1							
2							
3							
dst							
	Jumlah						
C	PHI						
1							
2							
3							
dst							
	Jumlah						

*) Mohon diisi penjelasan apakah perkara telah diputus atau masih proses. Jika masih proses, ada pada tahap apa. Jika telah putus, cantumkan tanggal putus. Jika perkara telah putus namun masih ada saldo, beri penjelasan.

Jakarta, Januari 2020
Ketua PN/PA

.....
NIP.

Lampiran 2

DATA PENEMPATAN UANG PERKARA DAN/ATAU UANG PIHAK KETIGA (UANG KONSINYASI, UANG TITIPAN PERKARA PIDANA, DAN PHI) KE REKENING BANK PERSEPSI TAHUN 2018 DAN 2019

No.	Nama Satuan Kerja	Nomor Perjanjian	Bank Persepsi	Nu. Rekening	Izin Kemenkeu	Saldo (Rp)		Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Saldo Minimal PPO (Rp)	Rate Jasa Giro	% PPO	Nominal PPO Terenkisusi		Bentuk Barang/ Uang	Keterangan	
						31 Des 2018	31 Des 2019						2018	2019			
1.																	
2.																	
3.																	
Dst..																	

- Catatan :
- Agar dapat dilampirkan perjanjian kerjasama untuk setiap satuan kerja
 - Kolom keterangan diisi uraian rincian bentuk barang/uang

Jakarta, Januari 2020
Ketua PN/PA/PTUN/PT/PTA/PT TUN

.....
NIP.